

OMBUDSMAN RI, FOOD ESTATE DI PROVINISI SUMBAR HARUS DIKAWAL BERSAMA

Rabu, 19 Mei 2021 - Marisya Fadhila

Padang, Infopadang - Ombudsman RI berkunjung ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kordinasi dan kerjasama dalam pengawasan pelayanan publik, Selasa (18/5).

Yeka Hendra Fatika selaku Anggota Ombudsman RI Periode 2016-2021 menyampaikan bahwa Ombudsman dibuatkan menurut Gusdur untuk memperjuangkan masyarakat marginal.

"Setiap rupiah APBD/APBN penggunaannya harusnya untuk pelayanan publik," ujar Yeka

Yeka menambahkan jika dunia pertanian adalah wilayah dari silent citizen yang tak berdaya terhadap kebijakan-kebijakan pertanian.

"Saat ini Food estate belum memperoleh hasil yang sesuai diharapkan, butuh perencanaan dan tidak hanya ikut-ikutan food estate," imbuh Yeka.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy menyampaikan bahwa Potensi pertanian dan peternakan di sumatera barat sangat besar, Food estate baru di usulkan ke pusat dan menduplikasi yang ada di pasaman barat, solok selatan, dan pariaman.

"Saat ini pasaman barat ada lahan 7700H bekas HGU, tanah ulayat yang sudah diserahkan ke pemerintah," ujar Audy.

Audy juga berharap penilaian kepatuhan standar layanan publik yang akan dilakukan Ombudsman jangan hanya sekedar penghargaan semata, namun tampak perbaikan pelayanan publik di Sumatera Barat.

Masalah petani tidak hanya pupuk dan benih, namun adalah skala lahan yang kecil, hal itu butuh peningkatan skala lahan dengan penambahan aktivitas seperti pertanian dengan peternakan, selain itu permasalahan pasar, saat musim panen harga turun.

"Niat food estate baik namun perencanaan dan pelaksanaan banyak masalah, oleh karena itu butuh pengawasan dalam program food estate ini," tutup Yeka

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar juga menyampaikan bahwa Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Perda pelayanan publik dan peraturan tentang pengelolaan pelayanan publik, namun penganggaran masih terbatas terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Bawa program food estate yang sedang digalakan oleh pemerintah harus menjadi perhatian bersama karena akan berdampak langsung kepada Petani," ujar Yefri.